



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018-2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2022



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR
24A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan...

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 24A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 24A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 24A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Lampiran VI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan...

14. Ketentuan Lampiran XIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan...

22. Ketentuan Lampiran XXII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpandan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badau diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan...

30. Ketentuan Lampiran XXX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selat Nasik diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian atas perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun muatan Program dan Kegiatan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ini memuat 9 Program, 22 Kegiatan dan 164 Sub Kegiatan yang merupakan hasil koreksi dan sinkronisasi oleh Tim Verifikasi Renstra terhadap Dokumen RPJMD, sehingga diharapkan dapat menjembatani antara kebijakan pembangunan nasional serta prioritas pembangunan daerah sebagai upaya pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan di tengah Pandemi Covid 19 yang belum usai saat ini.

Tanjungpandan, April 2022
Kepala Dinas,

Drs. SOEBAGIO
Pembina Tk I
NIP. 196610011995121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 7

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah 28

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih..... 29

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 30

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
pada RPJMD 33

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan 37

4.2. Sasaran 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ----- 40

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN --- 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN----- 77

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, dengan fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sebagai Perangkat daerah dengan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Rencana strategis Perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dilakukan dalam rangka perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Pasal 342 Permendagri 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan renstra perangkat daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dikarenakan terjadi perubahan kebijakan, diantaranya :

1. Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), beserta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.
3. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 2018- 2023 , sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Belitung nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 21).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung adalah untuk menyempurnakan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 guna mempertajam gambaran, tujuan dan sasaran lima tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, termasuk strategi, arah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah untuk percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- b. Pengelolaan pendidikan dasar
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah
- e. Penerbitan rekomendasi izin pendirian dan penutupan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat

- f. Penerbitan rekomendasi izin pendirian dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah
- h. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- i. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah
- j. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah
- k. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- l. Pembinaan sejarah lokal daerah
- m. Penetapan, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten
- n. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam satu propinsi;
- o. Pengelolaan museum daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat satu Sekretariat dan Lima Bidang Teknis yang memiliki fungsi sebagai berikut.

1. **Sekretariat** yang melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. pengelolaan dan laporan keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - f. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, organisasi dan tatalaksana serta urusan Aparatur Sipil Negara;
 - g. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
 - h. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, yang melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bagi pejabat fungsional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di wilayah Kecamatan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**, yang melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bagi pejabat fungsional Pendidikan Dasar di wilayah Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**, yang melaksanakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 - e. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Kebudayaan**, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan komunitas yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi;
- k. penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;

- l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan pembinaan kesenian;
- m. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian.
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Pembinaan Ketenagaan**, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- d. pelaksanaan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan nonformal dan ketenagaan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;

- h. pelaksanaan urusan usulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- j. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- k. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan dinas teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan pada struktur organisasi berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung memiliki pegawai sejumlah 81 Orang yang terdiri dari 72 orang PNS dan 9 orang Pegawai Harian Lepas (PHL). Jumlah sumber daya manusia ini disiapkan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam ruang lingkup Kabupaten Belitung. Adapun uraian pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan/Pangkat	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
Pembina Tk. I / IV b	9	4	13
Pembina / IV a	3	2	5
Penata Tk. I / III d	11	5	16
Penata / III c	5	5	10
Penata Muda Tk. I / III b	5	3	8
Penata Muda / III a	3	3	6
Pengatur Tk. I / II d	3	5	8
Pengatur / II c	1	1	2
Pengatur Muda Tk I / II b	1	3	4
Cleaning Service	1	2	3
Penjaga Malam	3	-	3
Peramu Taman	2	-	2
Sopir	1	-	1
JUMLAH	48	33	81

- Kedaaan Bulan Maret 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	1	-	1
S1	30	14	44
Diploma	2	5	7
SMA	15	14	29
Jumlah	48	33	81

- Kedaaan Bulan Maret 2022

Tabel 2.3. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan.

Jabatan/ Jenjang Diklat	Sudah Diklat		Belum Diklat		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Kadin/Diklatpim II	1	0	0	0	1
Sekretaris/Kabid/ Diklatpim III	1	0	3	1	5
Kasi/Kasubbag/ Diklatpim IV	4	0	5	8	17
Diklat PBJ	9	5	4	5	23
Jumlah	15	5	12	14	46

- Keadaan Bulan Maret 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri dari Sarana yang langsung Mendukung Pelaksanaan Tugas Kantor serta Sarana yang berada dibawah pengelolaan/Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Sarana yang ada di UPT Pendidikan dan Sekolah-sekolah. Sarana yang langsung mendukung pelaksanaan Tugas Kantor meliputi prasarana kantor berupa kendaraan, bangunan, perlengkapan kantor dan peralatan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas kantor. Adapun kondisi peralatan kerja yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung hingga saat ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah		
			Rusak	Baik	Total
1	Meja/Kursi Kerja	Unit	10	76	86
2	Kursi Rapat	Unit	-	100	100
3	Meja/Kursi Tamu	Set	-	9	9
4	Komputer				
	a. Personal Komputer	Unit	-	30	30
	b. Laptop/Notebook	Unit	-	5	5
5	Printer	Unit	-	32	32
6	LCD Proyektor	unit	1	4	5
7	Perangkat jaringan Internet	Set	-	2	2
8	Telepon	Unit	-	1	1
9	Mesin Fax	Unit	2	1	3
10	Televisi	Unit	1	3	4

11	Filling Kabinet	Unit	7	20	27
12	Lemari Arsip	Unit	3	22	25
13	Air Conditioner (AC)	Unit	4	19	23
14	Papan Pengumuman	Unit	-	10	10
15	Kendaraan Dinas				
	a. Mobil	Unit	-	5	5
	b. Motor	Unit	-	49	49

Sumber : Data Inventaris Dikbud 2021

Sarana dan Prasarana yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebar pada empat UPT Satuan Pendidikan dan UPT Museum, serta pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri. Jumlah Aset/Modal keseluruhan yang menjadi pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Kondisi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Nilai Aset
1	Tanah	10.453.841.640,00
2	Peralatan dan Mesin	51.918.885.044,65
3	Gedung & Bangunan	142.615.952.853,90
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	10.689.563.764,51
5	Aset Tetap Lainnya	44.277.709.870,95
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	651.872.700,00
	Jumlah	260.607.825.874,01

Sumber : Data Aset Dikbud 2021

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah Satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan Penarikan Retribusi Daerah berupa Jasa Usaha Untuk Objek Penyewaan Tanah dan Bangunan Gedung Nasional Tanjungpandan dan Retribusi Tempat Pariwisata UPT Museum Tanjungpandan. Kedua Objek Retribusi Usaha yang dikelola Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, sampai saat ini masih berjalan/operasional, walaupun secara persentase jumlah Retribusi yang berhasil ditarik tidak terlalu besar dibandingkan dengan Retribusi Daerah sektor lain. Penerimaan Retribusi jasa Usaha Penyewaan Tanah dan Gedung Nasional serta Retribusi Pariwisata UPT Museum Tanjungpandan sangat bergantung dari berapa banyak orang/pihak yang menyewa serta jumlah pengunjung yang masuk pada UPT Museum.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung akan melakukan penjaminan peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan pelayanan akses pendidikan di wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 48 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan.

Adapun jenis layanan pendidikan dan kebudayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan pendidikan yaitu perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Selain itu juga pemerintah harus memenuhi layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana untuk urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah periode sebelumnya (2013-2018) berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Realisasi Anggaran Pendanaan akan di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Keadaan Siswa 5 (lima) tahun terakhir

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
KB/TPA/SPS	1.347	1.367	1.348	1.999	
TK/RA	2.402	2.319	2.848	3.190	
SD/MI	19.411	19.524	19.404	19.162	19.173
SMP/MTs	8.696	8.434	8.090	8.347	8.464
Paket A	63	51	48	47	
Paket B	232	329	286	247	
Paket C	499	431	392	365	
Jumlah	32.650	32.455	32.416	33.357	

Tabel 2.7. Keadaan Lembaga 5 (lima) tahun terakhir

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
KB/TPA/SPS	53	50	50	52	49
TK/RA	52	53	53	54	53
SD/MI	122	122	122	122	122
SMP/MTs	32	32	32	32	32
SKB	1	1	1	1	1
PKBM	5	5	5	7	8
KURSUS	12	12	12	12	12
Jumlah	277	277	275	280	277

Tabel 2.8. Perkembangan Persentase Hasil Kelulusan 5 (lima) tahun terakhir

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Tabel 2.9. Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah 5 (lima) tahun terakhir

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	0,11	0,14	0,13	0,15	0,19
SMP/MTs	0,74	0,17	0,11	0,30	0,33

Tabel 2.10. Perkembangan Akses Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)			Angka Partisipasi Murni (APM)	
	PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
2017	61,36	119,17	100,10	108,95	81,69
2018	62,19	117,88	98,52	99,59	79,92
2019	55,20	105,71	102,71	94,39	78,5
2020	59,88	102,69	100,38	94,99	81,18
2021	48,77	98,49	93,68	89,20	77,66

Tabel 2.11. Perkembangan Angka Melanjutkan 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Jenjang SD/SMP	
	Ke SMP/MTs (%)	Ke SMA/SMK (%)
2017	97,32	94,06
2018	96,59	95,67
2019	99,83	94,33
2020	96,70	87,11
2021	93,84	89,05

Tabel 2.12. Persentase Jumlah Tenaga Pendidik dan Persentase yang berkualifikasi S1/DIV 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Jenjang		Kualifikasi S1/DIV
	SD/MI	SMP/MTs	
2017	1.197	485	82,36 %
2018	1.192	481	82,84 %
2019	1.150	475	88,22 %
2020	1.193	504	80,30 %
2021	941	417	

Tabel 2.13. Perkembangan Akreditasi Sekolah tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI				JUMLAH	PERSENTASE TERAKREDITASI	KET
		TERAKREDITASI			BELUM			
		A	B	C				
1	PAUD	5	67	25	5	102	95,10	
2	SD/MI	13	102	7	0	122	100,00	
3	SMP/MTs	16	14	2	0	32	100,00	

**Tabel 2.14. Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Targ et SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun				8,07	8,09	8,33	8,35	8,37	8,07	8,09	8,10	8,11	8,58	100	100	97,2	97,1	102,5
2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B				46,77	46,77	98,39	99,19	99,19	46,77	46,77	98,39	98,39	98,39	100	100	100	99,2	99,2
3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B				73,08	73,08	93,33	96,67	99,67	73,08	73,08	93,33	93,33	93,33	100	100	100	96,5	93,6
4	Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD				70,61	72,01	77,84	77,90	78,00	70,61	72,01	77,84	61,43	60,19	100	100	100	78,9	77,17
5	Angka partisipasi Murni (APM) PAUD				44,65	48,00	48,61	48,91	49,00	44,65	48,00	48,61	45,33	43,68	100	100	100	92,7	89,14
6	Angka partisipasi Kasar (APK) SD				108,50	109,00	109,50	110,00	110,00	106,09	120,78	122,53	119,17	117,88	97,8	110,8	111,9	108,3	107,16
7	Angka partisipasi Murni (APM) SD				99,00	99,20	99,50	99,70	99,80	98,65	99,80	107,34	108,95	99,59	99,6	100,6	107,9	109,3	99,79
8	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP				104,50	105,00	105,50	106,00	106,50	102,54	101,82	111,07	100,10	98,52	98,1	97,0	105,3	94,4	92,5
9	Angka partisipasi Murni (APM) SMP				95,00	97,00	97,50	98,00	98,5	88,33	87,77	100,15	81,69	79,92	93,0	90,5	102,7	83,4	81,13
10	Persentase Kelulusan SD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Kelulusan SMP				99,70	99,80	99,90	100	100	99,77	100	100	100	100	100,1	100,2	100,1	100	100

12	Cakupan potensi kebudayaan daerah				70	75	80	80	80	70	75	80	80	80	100	100	100	100	100
13	Kajian seni (Sarasehan/workshop, Diskusi, Bengkel seni, Penyerapan narasumber, Studi kepustakaan, Penggalan, Inventarisasi, Dokumentasi, Pengemasan bahan kajian)				2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	100	100	100	100
14	Fasilitasi seni (Penyuluhan substansial maupun teknikal, Pemberian bantuan, Apresiasi, Bimbingan organisasi, Kaderisasi, Promosi, Penerbitan dan dokumentasi)				4 kali	4 kali	5 kali	5 kali	6 kali	4 kali	4 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100	100	100	100	100
15	Gelar seni (Pagelaran, Pameran, Festival, Lomba)				10 kali	12 kali	15 kali	15 kali	15 kali	10 kali	12 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100	100	100	100	100
16	Cakupan tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran, Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya)				3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100	100	100	100	100
17	Cakupan organisasi (Organisasi struktural yang menangani kesenian, Lembaga kesenian/dewan kesenian) lembaga.				1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100	100	100	100	100
18	Perlindungan terhadap cagar budaya				10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	100	100	100	100	100

19	Frekuensi pembinaan nilai-nilai tradisi budaya daerah				5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	6 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100	100	100	100	100
20	Persentase (%) ketatalaksanaan dan akuntabilitas Kinerja				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase (%) tingkat Pengelolaan Sumber Daya Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase (%) jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.15. Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung Tahun 2019-2020**

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rata-rata lama Sekolah (RLs)				8,41 Thn	8,45 Thn	8,41 Thn	8,46 Thn	100	100,12
2	Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SD				0,14	0,13	0,13	0,15	107,14	84,62
3	Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP				0,16	0,15	0,11	0,30	131,25	0,00
4	Angka Melanjutkan (AM) SD				98,83%	98,85%	99,83 %	96,70 %	101,01	97,82
5	Angka Melanjutkan (AM) SMP				97,98%	98,00%	94,33 %	87,11 %	96,27	88,89
6	Persentase Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi				90,57	91,51	90,57	98,96	100	108,14
7	Persentase Jumlah SD yang terakreditasi A				8,33	10,00	8,13	10,66	97,60	106,6
8	Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi A				55,17	62,07	46,88	46,88	84,97	75,53
9	Persentase Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV				78,05	81,03	88,84	80,30	113,82	99,10
10	Persentase Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik				65,03	70,03	75,00	42,39	115,33	60,53
11	Persentase pemajuan kebudayaan daerah				12	14	12	30,08	100	214,86

**Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	192.706	185.645	159.763	181.627	188.182	123.191	131.772	135.391	123.701	123.006	63,9 %	70,98 %	84,7 %	68,1 %	65,37 %	-1%	0%
Belanja Langsung	51.015	64.035	50.860	40.575	63.949	42.483	56.866	45.183	37.266	55.120	83,3 %	88,80 %	88,8 %	91,8 %	84,60 %	6%	7%
Total Belanja	243.721	249.680	210.623	222.202	252.131	165.674	188.638	180.574	160.967	178.126	68 %	75,55 %	85,7 %	72,4 %	70,65 %	1%	2%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

2.4.1. Akses

Tantangan	2. Masih ada warga kabupaten yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diukur dari persentase angka melanjutkan SD ke SMP pada tahun 2018 baru mencapai 96,59 %. 3. Belum semua warga masyarakat usia dini mengakses layanan pendidikan pendidikan anak usia dini yang diukur dari pencapaian angka partisipasi kasar PAUD pada tahun 2018 baru mencapai 60,19 %. 4. Masih terdapat anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar karena alasan ekonomi dan non ekonomi dilihat dari persentase angka putus sekolah tahun 2018 untuk SD 0,14% dan SMP 0,17%. 5. Terbatasnya siswa yang mengetahui tentang potensi kebudayaan daerah.
-----------	---

Peluang	1. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan anggaran. 2. Terdapat minimal satu satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa/kelurahan. 3. Adanya pelajaran muatan lokal di satuan pendidikan untuk integrasi pengetahuan budaya daerah.
---------	--

2.4.2. Mutu

Tantangan	1. Belum semua satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan 2. Masih ada satuan pendidikan yang terakreditasi C dan belum terakreditasi. 3. Masih ada guru jenjang PAUD dan Dikdas yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1/DIV.
-----------	---

	4. Kompetensi guru yang belum memadai jika diukur dari hasil uji kompetensi Guru (UKG). 5. Sebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata. 6. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah. 7. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal. 8. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang kebudayaan
Peluang	1. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan anggaran. 2. Sebagian besar satuan pendidikan dasar telah terakreditasi minimal B. 3. Adanya sistem Zonasi pada PPDB sehingga siswa tidak menumpuk di satu sekolah yang dianggap favorit. 4. Adanya aturan untuk akreditasi lembaga pendidikan non formal. 5. Adanya peningkatan minat dan apresiasi kaum muda terhadap seni budaya lokal daerah 6. Banyaknya nilai – nilai seni budaya yang dapat digali dan dikembangkan. 7. Banyaknya pagelaran seni budaya tingkat lokal, nasional dan internasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan kesetaraan. Terkait kewenangan urusan pendidikan tersebut dimungkinkan terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan layanan perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan pendidikan dan kebudayaan saat ini bersifat sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada hakekatnya menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang termasuk didalamnya adalah aktor pada pembangunan itu sendiri. Layanan perangkat daerah terkait akses dan mutu dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis pada tahun perencanaan 2013-2018, yang secara umum sudah mencapai target yang direncanakan. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi terkait dengan urusan pendidikan dan kebudayaan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel.3.1.Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Layanan OPD	Ketuntasan Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun belum 100%	Angka melanjutkan SD baru 96,59 %.	Ketersediaan daya tampung SMP terbatas	Motivasi siswa untuk melanjutkan ke SMP	Sebaran pendidikan menengah pertama yang belum merata.
			Belum tersedia Bantuan diluar biaya operasional sekolah	Faktor Ekonomi dan non ekonomi	Motivasi belajar siswa rendah
Layanan	Persentase layanan	APK	Ketersediaan daya tampung	Sebaran penduduk	Tingkat Akses

OPD	PAUD baru mencapai 60,19 %.	PAUD	PAUD terbatas	yang tidak merata	PAUD masih rendah
Kebudayaan yang terintegrasi dengan pendidikan	Budaya lokal daerah belum menjadi muatan lokal di sekolah	Kurikulum muatan lokal daerah	Kurikulum muatan lokal daerah belum berbasis budaya lokal	Dukungan Pemerintah daerah	Kurikulum muatan lokal belum memuat materi budaya lokal daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan dinas teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan di dalam mendukung perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penyelesaian permasalahan daerah berupa penurunan jumlah masyarakat miskin dan penurunan angka pengangguran. Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Kabupaten Belitung yang berkaitan dengan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

1. Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.
2. Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel berikut merupakan faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terkait pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel 3.2.Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan	1. Tingkat Akses PAUD masih rendah 2. Sebaran pendidikan menengah pertama yang belum merata 3. Motivasi belajar siswa rendah	1. Daya tampung PAUD terbatas 2. Daya tampung SMP terbatas 3. Belum tersedia Bantuan diluar biaya operasional sekolah	1. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk peningkatan mutu dan akses pendidikan serta program bantuan untuk siswa tidak mampu
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat			
2.	Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kurikulum muatan lokal belum memuat materi budaya lokal daerah	Belum disusun kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi sosial budaya lokal	Perkembangan destinasi pariwisata daerah
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 kerangka besar visi, misi dan Tujuan kementerian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai palajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri Utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri,

beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut kemendikbud memiliki Misi sebagai upaya mewujudkan Nawacita Kedua, sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No	Tujuan
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Adapun misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung 2017 -2022 yaitu sebagai berikut.

Kode	Rumusan Misi
M1	Meningkatkan akses pendidikan
M2	Meningkatkan mutu pendidikan
M3	Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal
M4	Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan

Adapun tujuan dari rencana pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut.

Rumusan Tujuan

Misi	Rumusan Tujuan
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus
Meningkatkan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus
Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal	Relevansi pendidikan Vokasi
Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan	Penyediaan dukungan layanan manajemen pendidikan

Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan adalah MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERBASIS BUDAYA LOKAL. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas

Tabel 3.4.Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Sebaran sekolah dan guru yang belum merata	Dukungan Anggaran APBD Kabupaten
2.	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	Meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang	Angka putus sekolah dan angka melanjutkan	Dukungan anggaran APBD Kabupaten

3.	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Akses PAUD dan pendidikan masyarakat	Dukungan anggaran APBD Kabupaten
4.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	1. Masih terbatasnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional 2. Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak dan kurang terpelihara	Dukungan anggaran	Dukungan pengembangan wisata berbasis seni budaya lokal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, strategi pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Konsep Tata Ruang Wilayah yaitu berupa Kawasan Lindung Cagar Budaya yang terdiri dari:

1. Bangunan Gedung Eks. Kantor Pusat PT. Timah (Jam Gede);
2. Wisma Bougenville (Bekas Rumah *Hoofadministratur*);
3. Eks *Chineesche Hospital*;
4. RSUD Kab. Belitung (Eks*Europeesch Kliniek*);
5. Rumah Tipe Kolonial I;
6. Rumah Tipe Kolonial II;
7. Museum Pemkab. Belitung;
8. Wisma Pantai;
9. Bekas Kapel Regina Pacis;
10. Eks*Societeit*;
11. Rumah Kapiten Pang Tjong-Toen;
12. Kelenteng Hok Tek Che;

13. Kian Sien;
14. SMPN 1 Tanjungpandan (Eks*Holland Indisch School*);
15. Kantor Dinas P dan K Kab. Belitung;
16. Gedung PWRI (Eks*Tuindienst*);
17. Eks. Kantor Asisten Residen (Dinas P dan K);
18. Kantor Kodim 0414 Garuda Dempo;
19. Galangan Kapal (*Dockyard*);
20. Wisma Dian (Benteng Kuehn);
21. Gedung Nasional;
22. Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung);
23. *Kherkhof* (Pemakaman Belanda);
24. Situs Makam KA. Rahat;
25. Situs Bukit Luday;
26. Mercusuar Pulau Sumedang;
27. Situs Lempak Tuk Layang;
28. Museum Badau;
29. Makam Datuk Mayang Geresik;
30. Situs Kota Tanah Cerucuk (Cakraningrat X);
31. Makam Tuk Kundo;
32. Struktur Gerbang Bentek Kenupuk;
33. Situs Gunung Tajam (Makam Syech Abubakar Abdullah);
34. Situs Mentikus;
35. Masjid Al Ikhlas;
36. Kelenteng Hok Tek Che;
37. Mercusuar Pulau Lengkuas;
38. Situs Padang Kelarin;
39. Situs Padang Pendam;
40. Kelenteng Piet Tie Miauw; dan
41. Mercusuar Tanjung Lancur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Kawasan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sosial Budaya meliputi:

- a. Kawasan makam bersejarah yaitu Situs Kota Tanah Cerucuk (makam Depati Tjakraningrat VII dan IX), Situs Ai' Labu (makam KA Rahat), Situs Luday (makam Datuk Ahmad Mempawah), Situs Membalong (makam KA Deraip), Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik), Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah), Situs Parit Gunung (makam Tuk Kundo), Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda);
- b. Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah Tipe Kolonial I dan Rumah Tipe Kolonial II, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Jun, Rumah Tuan Kuase (Wisma Bougenville), Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek* (RSUD Kab. Belitung), Museum Tanjungpandan, Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks. *Tuindienst* (Sekretariat PWRI), Eks. *Landraad* (UPTD TK/SD Tanjungpandan), Eks. *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn;
- c. Kawasan bersejarah lainnya yaitu Museum Badau, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Situs Mentikus Air Selumar, Mercusuar Pulau Lengkuas, Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lacur), Mercusuar Pulau Sumedang;
- d. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk; dan
- e. Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Sijuk.

Adapun strategi pengelolaan situs dan Cagar Budaya dilakukan melalui:

- a. Larangan terhadap segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya;
- b. Pengembangan zona-zona dan kawasan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya; dan
- d. Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dijalankan dan secara moral serta etika birokratisnya dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pendidikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pada pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung serta berdasarkan telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Kabupaten Belitung, dapat ditentukan isu-isu strategis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yaitu sebagai berikut :

1. Belum Meratanya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan;
2. Belum Maksimalnya ekosistem Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu unsur utama pengembangan sumber daya manusia yang dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang dan sektor. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang harus mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana yang tergambar di dalam diagram di bawah ini sehingga dapat saling mendukung dalam menuntaskan permasalahan pendidikan dan kebudayaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis kondisi terkini. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau diinginkan untuk waktu tertentu, biasanya satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut.

- a. Misi Kesatu RPJMD : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, yang diwujudkan dengan tujuan berikut:
Tujuan Kesatu : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- b. Misi Ketiga RPJMD : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, akan diwujudkan dengan tujuan berikut:

Tujuan Kesatu : Memaksimalkan ekosistem kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan daerah

4.2. Sasaran

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, akan dicapai dengan sasaran berikut:

Sasaran Kesatu	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan
Sasaran Kedua	Meningkatnya mutu layanan manajemen kependidikan

- b. Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga : Meningkatkan ekosistem kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan daerah, akan dicapai dengan sasaran berikut:

Sasaran Kesatu	Meningkatnya ekosistem pemajuan kebudayaan daerah
----------------	---

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama Sekolah (RLs)	8,15	8,41	8,45	8,46	8,51	8,56	8,56
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	0,31	0,30	0,28	0,24	0,20	0,18	0,18
		Meningkatnya Mutu Layanan Manajemen Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru PNS							
			- Guru Kelas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08
			- Guru Mata Pelajaran Tingkat SD	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
			- Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32
3.	Meningkatkan ekosistem Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	10%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
		Meningkatnya ekosistem Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	10%	12%	14%	16%	18%	20%	20%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah penjabaran dari sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023.			
Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Pemenuhan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan	1. Pemenuhan sarpras Pendidikan 2. Pendampingan Akreditasi Sekolah 3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Non Formal 4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak
	2. Meningkatnya Mutu Layanan Manajemen Kependidikan	2. Peningkatan Mutu Layanan Manajemen Kependidikan	1. Meningkatkan Kualitas SDM Pendidikan 2. Meningkatkan Pemerataan sebaran guru 3. Memberikan bantuan pendidikan bagi Siswa kurang mampu.
Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan ekosistem Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	1. Meningkatnya ekosistem Pemajuan Kebudayaan	1. Penggalian dan Pengembangan potensi Seni budaya Daerah.	1. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya. 2. Meningkatkan pengelolaan museum

			3. Peningkatan sarana prasarana Kebudayaan
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah strategi dan arah kebijakan 5 (lima) tahunan ditetapkan, maka selanjutnya dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Seiring dengan berlakunya Peraturan Bupati Belitung nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selama ini melakukan Pengelolaan anggaran secara mandiri, sejak berlakunya peraturan tersebut, maka UPT SKB dan Satuan Pendidikan SMP pengelolaan anggarannya dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Pengguna Anggaran.

Program yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2020 terdiri dari sebagai berikut.

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Pendidikan Non Formal
4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
5. Manajemen pelayanan pendidikan
6. Pengembangan nilai budaya
7. Pengelolaan kekayaan budaya
8. Pengelolaan keragaman budaya
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11. Peningkatan Disiplin Aparatur
12. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah
13. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah

Adapun rincian pendanaan dari Program dan Kegiatan periode Renstra 2019-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun Perencanaan				Unit Kerja Penanggun g jawab
						Tahun-1		Tahun-2		
						(2019)		(2020)		
						Target	Rp (x1.000)	Target	Rp (x1.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(19)
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat				Rata-rata Lama Sekolah (RLs)	8.15	8.41		8.45		
				Harapan Lama Sekolah (Hls)	11.83	11.84		11.86		
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan			Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SD	0.14	0.14		0.13		
				Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP	0.17	0.16		0.15		
				Angka Melanjutkan (AM) SD	96.59	98.83		98.85		
				Angka Melanjutkan (AM) SMP	94.33	97.98		98		
	Meningkatnya Mutu Layanan Manajemen Kependidikan			Persentase Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	90.57	90.57		91.51		
				Persentase Jumlah SD yang terakreditasi A	8.33	8.33		10		
				Persentase jumlah SMP yang terakreditasi A	55.17	55.17		62.07		
				Persentase Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1/DIV	75.05	78.05		81.03		
				Persentase Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik	60.63	65.03		70.03		
		1.01.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.	61.43%	62.93%	4,585,585	64.43%	8,622,778	Bidang PAUD dan PNF
			Pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta pengembangan kurikulum PAUD		150 org	168,299	200 org	224,000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa PAUD yang berprestasi		3 jenis	191,845	4 jns	405,350	
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Operasional PAUD		15 sklh	522,660	15 sklh	618,560	
			Penyediaan buku administrasi siswa PAUD	Buku Administrasi Siswa PAUD		4 jns	17,465	4 jns	37,780	

			Pengadaan peralatan Sekolah	Laptop		1 jns	58,000			
			Pembangunan ruang kelas TK	Ruang Kelas TK		2 rg	605,600			
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi TK	Sarana air bersih dan sanitasi		2 sklh	242,850			
			Rehabilitasi Gedung TK	Gedung sekolah dalam kondisi baik		2 sklh	355,600			
			DAK BOP PAUD (DAK Non Fisik)	Dana Operasional PAUD		89 lmbg	601,000			
			Pengadaan Tanah	Terpenuhinya tanah untuk bangunan sekolah		1 lok	33,800			
			Pengembangan karakter, minat, bakat dan kreatifitas siswa PAUD	Siswa PAUD yang berprestasi				4 jns	334,005	
			Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal	Guru PAUD Non PNS yang mendapat insentif				363 org	1,743,000	
			Tambahan penghasilan guru PAUD (TK, RA, BA, PAUD Non Formal) Non PNS (DABA)	Guru PAUD Non PNS yang menerima tambahan penghasilan				383 org	919,600	
			Pembangunan Sarana dan prasarana PAUD	Sarana belajar PAUD Negeri				4 jns	2,053,232	
			Bantuan operasional Pengelolaan PAUD	Operasional PAUD				89 lmbg	2,916,600	
			Pembangunan prasarana belajar PAUD	Prasarana belajar PAUD yang dibangun				10 jns	1,180,000	
			Rehabilitasi prasarana belajar PAUD	Prasarana belajar PAUD dlam kondisi baik				2 jns	271,000	
			Pengadaan sarana belajar	Sarana Belajar PAUD				4 jns	500,000	
			Pendampingan Akreditasi PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi				20 lmbg	50,000	
		1.01.01.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				93,132,775		63,519,526	
			Bidang Pembinaan SD							Bidang SD
			Indikator 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	119.17%	100%		100%	8,255,619	
			Penyediaan buku laporan hasil belajar siswa & buku administrasi kelas SD	Buku administrasi siswa SD		3 jns	115,060			
			Pengadaan Meubelair SD	Meubelair SD		5 rg	947,200			
			Pembangunan pagar SD	Pagar sekolah		3 sklh	1,972,948			
			Rehabilitasi ruang kelas SD	Ruang kelas yang diperbaiki		9 rg	2,274,000			
			Rehabilitasi prasarana belajar SD (DAK Reguler)	Prasarana SD yang diperbaiki		3 jns	1,944,524			

			Pembangunan prasarana belajar SD (DAK Reguler)	Tersedianya prasarana belajar SD		3 jns	827,664.60			
			Pengadaan sarana belajar SD (DAK Reguler)	Tersedianya prasarana belajar SD		4 jns	424,974			
			<i>Rehabilitasi prasarana belajar SD</i>	Prasarana belajar dalam kondisi baik				3 jns	3,963,848	
			<i>Pembangunan prasarana belajar SD</i>	Prasarana belajar SD yang dibangun				4 jns	4,291,771	
			Indikator 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96.64%	97.64%		97.44%	28,538,467	
			Pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD	Perlombaan tingkat SD		3 jns	623,299.50			
			Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI	Bantuan operasional pendidikan		19.500 siswa	2,340,600	19.500 siswa	2,340,600	
			Penilaian hasil Pendidikan jenjang SD	Siswa SD yg mengikuti Ujicoba, Ujian Sekolah, dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI		3.196 siswa	208,163.60			
			Pengembangan kesiswaan untuk pendidikan karakter	Pengembangan pendidikan karakter		35 siswa	51,675			
			Bantuan Operasional Sekolah (APBN)	Terlaksananya kegiatan belajar SD dan SMP		100%	23,102,000			
			Pembinaan dan pengembangan karater, mintat, bakat dan kretaifitas siswa SD	Prestasi siswa SD				4 jns	853,547	
			Penilaian hasil Belajar SD	Nilai Ujian SD				196 siswa	488,976	
			Pengembangan kurikulum SD/MI	Jumlah Peserta Pelatihan						
			Pendampingan Akreditasi SD/MI	Jumlah sekolah yang meningkat Akreditasinya						
			<i>Pengadaan sarana belajar SD</i>	Sarana belajar SD				5 jns	741,343	
			<i>Bantuan operasional Sekolah</i>	Bantuan Operasional sekolah sembilan tahun				100%	24,102,000	
			Bidang Pembinaan SMP							Bidang SMP
			Indikator 3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100.10%	100%		100%	15,522,932	
			Penyediaan buku administrasi siswa SMP	Buku administrasi siswa SMP		1 jns	67,900			
			Penataan lingkungan sekolah	Pagar dan jalan lingkungan sekolah		2 sklh	468,800			
			Rehabilitasi WC SMP	WC Siswa SMP		3 sklh	135,500			
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah	Sarana air bersih dan sanitasi		1 unit	36,600			

			Penambahan daya listrik dan perbaikan jaringan instalasi listrik	Bertambahnya daya listrik dan terpeliharanya jaringan instalasi		5 sklh	80,550			
			Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Peralatan laboratorium komputer		5 sklh	2,460,220			
			Pengadaan Meubelair SMP	Meubelair SMP		3 rg	90,550			
			Rehabilitasi prasarana belajar SMP (DAK reguler)	Prasarana belajar SMP yang diperbaiki		7 jns	2,184,560			
			Pembangunan prasarana belajar SMP (DAK Reguler)	Tersedianya prasarana belajar SMP		3 jns	1,235,500			
			Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK Reguler)	Sarana belajar SMP		10 jns	2,492,500			
			Pembangunan prasarana penunjang SMP	Ruang UKS		1 sklh	80,600			
			Rehabilitasi prasarana penunjang SMP	Kantin sekolah dalam Kondisi baik		1 sklh	35,300			
			<i>Rehabilitasi prasarana belajar SMP</i>	Prasarana belajar SMP dalam kondisi baik				5 jns	9,251,423	
			<i>Pembangunan prasarana belajar SMP</i>	Prasarana belajar SMP yang dibangun				3 jns	6,271,508	
			Indikator 4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81.69%	82.09%		82.49%	11,202,509	
			Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan olahraga prestasi siswa SMP	Prestasi siswa SMP		5 jns	753,612			
			Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs	Biaya penunjang pendidikan		9.000 org	1,080,600	9.000 org	1,080,600	
			Penilaian hasil pendidikan jenjang SMP	Nilai ujian SMP		2.900 siswa	105,450			
			Pembinaan dan pengembangan karakter, minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP	Prestasi Siswa SMP				5 jns	1,079,365	
			Penilaian hasil belajar SMP	Nilai ujian SMP				2.900 siswa	220,852	
			Kesejahteraan Tenaga GTT dan PTT SD/SMP	Tenaga GTT dan PTT yang menerima insentif				385 org	1,848,300	
			Tambahan penghasilan Guru SD dan SMP Sekolah Terpencil	Tenaga guru SD dan SMP sekolah terpencil yang menerima insentif				120 org	660,000	
			Pengelolaan UPT SMPN 1 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 1 Tanjungpandan		1 thn	306,720	1 thn	306,720	
			Pengelolaan UPT SMPN 2 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 2 Tanjungpandan		1 thn	362,095	1 thn	362,095	
			Pengelolaan UPT SMPN 3 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 3 Tanjungpandan		1 thn	243,500	1 thn	243,500	
			Pengelolaan UPT SMPN 4 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 4 Tanjungpandan		1 thn	174,940	1 thn	174,940	
			Pengelolaan UPT SMPN 5 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 5 Tanjungpandan		1 thn	211,685	1 thn	211,685	
			Pengelolaan UPT SMPN 6 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 6 Tanjungpandan		1 thn	234,295	1 thn	234,295	
			Pengelolaan UPT SMPN 7 Tg.Pandan	Operasional UPT SMPN 7 Tanjungpandan		1 thn	397,059	1 thn	397,059	

			Pengelolaan UPT SMPN 1 Sijuk	Operasional UPT SMPN 1 Sijuk		1 thn	196,825	1 thn	196,825	
			Pengelolaan UPT SMPN 2 Sijuk	Operasional UPT SMPN 2 Sijuk		1 thn	304,103	1 thn	304,103	
			Pengelolaan UPT SMPN 3 Sijuk	Operasional UPT SMPN 3 Sijuk		1 thn	155,680	1 thn	155,680	
			Pengelolaan UPT SMPN 4 Sijuk	Operasional UPT SMPN 4 Sijuk		1 thn	106,098	1 thn	106,098	
			Pengelolaan UPT SMPN 1 Badau	Operasional UPT SMPN 1 Badau		1 thn	213,991	1 thn	213,991	
			Pengelolaan UPT SMPN 2 Badau	Operasional UPT SMPN 2 Badau		1 thn	272,200	1 thn	272,200	
			Pengelolaan UPT SMPN 3 Badau	Operasional UPT SMPN 3 Badau		1 thn	130,830	1 thn	130,830	
			Pengelolaan UPT SMPN 1 Membalong	Operasional UPT SMPN 1 Membalong		1 thn	177,502	1 thn	177,502	
			Pengelolaan UPT SMPN 2 Membalong	Operasional UPT SMPN 2 Membalong		1 thn	223,833	1 thn	223,833	
			Pengelolaan UPT SMPN 3 Membalong	Operasional UPT SMPN 3 Membalong		1 thn	134,730	1 thn	134,730	
			Pengelolaan UPT SMPN 4 Membalong	Operasional UPT SMPN 4 Membalong		1 thn	65,682	1 thn	65,682	
			Pengelolaan UPT SMPN 5 Membalong	Operasional UPT SMPN 5 Membalong		1 thn	138,800	1 thn	138,800	
			Pengelolaan UPT SMPN 1 Selat Nasik	Operasional UPT SMPN 1 Selat Nasik		1 thn	198,025	1 thn	198,025	
			Pengelolaan UPT SMPN 2 Selat Nasik	Operasional UPT SMPN 2 Selat Nasik		1 thn	82,550	1 thn	82,550	
			<i>Pengadaan Sarana Belajar SMP</i>	Sarana belajar SMP				8 jns	2,020,425	
			Pengembangan kurikulum SMP/MTs	Peserta pengembangan kurikulum						
			Pendampingan Akreditasi SMP/MTs	Jumlah SMP/MTs yang meningkat Akreditasinya						
		1.01.01.03	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16.67%	33.33%	4,222,480	50%	6,589,811	Bidang PAUD dan PNF
			Penyediaan dana pengembangan pendidikan non formal	Bantuan operasional pendidikan non formal		772 siswa	232,200	772 siswa	255,420	
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan		3 prog	186,300			
			Pengadaan Media Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Komputer dan perlengkapannya						
			Pengelolaan UPT SKB Belitung	Operasional SKB Belitung		1 thn	826,814	1 thn	637,566	
			<i>Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler)</i>	Prasarana belajar SKB yang diperbaiki		2 jns	625,000			
			<i>Pembangunan prasarana belajar SKB (DAK Reguler)</i>	Prasarana belajar SKB		2 jns	1,947,646			
			<i>Pengadaan sarana belajar SKB (DAK Reguler)</i>	Sarana belajar SKB		4 jns	917,000			
			<i>BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)</i>	Lembaga penerima BOP		6 lmbg	209,800			

			Peningkatan Mutu TPA (DABA)	Insentif ustadz/ustadzah		100%	2,013,500			
			Penilaian hasil belajar pendidikan non formal	Peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan				480 siswa	181,730	
			Pengembangan kurikulum pendidikan non formal	Peserta pengembangan kurikulum pendidikan non formal				45 org	69,095	
			Pendampingan Akreditasi Pendidikan Non Formal	Pendidikan non formal yang terakreditasi				4 lmbg	24,200	
			Pembinaan Saka Widya Budaya Bhakti	Saka widya budaya bakti yang dibina				1 org	50,000	
			Peningkatan Mutu TPA	Insentif ustadz/ustadzah				100%	2,013,500	
			Bantuan operasional pengelolaan pendidikan (BOP) Kesetaraan	Lembaga penerima BOP				6 lmbg	558,300	
			Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	Prasarana belajar yang diperbaiki						
			Pembangunan prasarana belajar SKB	Prasarana belajar SKB				4 jns	1,700,000	
			Pengadaan sarana belajar SKB	Sarana belajar SKB				6 jns	1,100,000	
		1.01.01.04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6,336,470		933,250	
			Indikator 1	Persentase Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar Kompetensi	60.63%	65.03%		70.03%	812,850	
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapat pelatihan		430 org	705,420	120 org	200,000	
			Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal	Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal		363 org	1,743,000			
			Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS		45 org	227,735	45 org	112,850	
			Kesejahteraan tenaga PTT dan GTT SD/SMP	Insentif PTT dan GTT SD/SMP		385 org	1,848,300			
			Tambahan penghasilan guru PAUD (TK, RA, BA, PAUD Non Formal Non PNS (DABA)	Insentif GTT PAUD Non PNS		383 org	919,600			
			Oympiade Sains Guru SD/MI dan SMP/MTs	Terlaksananya Olympiade Sains Guru		75 org	56,830			
			Penguatan Implementasi kurikulum 2013 bagi kepala SD dan Guru SD/MI dan SMP/MTs	Terlaksananya penguatan Implementasi kurikulum		66 org	108,016			
			Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan		130 org	154,185			
			Penguatan manajerial Tenaga Pendidik dan kependidikan	Peserta bimtek manajerial terlatih		40 org	1,786,683			

			Uji Kompetensi Guru	Peserta Uji Kompetensi		80 org	340,939.50			
			Peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar	Peserta Workshop kompetensi Robotik		20 org	224,340			
			Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Dasar	Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pengembangan dan pembinaan profesi				200 org	500,000	
			Indikator 2	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75.05%	78.05%		81.03%	120,400	
			Peningkatan Kualifikasi Guru TK/RA/BA ke S1 (DABA)	Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru		80 org	195,180			
			Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan Non Formal	Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan peningkatan kualifikasi pendidikan				40 org	120,400	
		1.01.01.05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	52,860	90%	275,000	
			Monitoring dan Evaluasi BOS dan Bantuan Lainnya	Laporan pelaksanaan BOS dan bantuan lainnya		1 dok	25,340			
			Beasiswa utusan daerah program S1	Beasiswa utusan daerah		20 org	1,384,000			
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan	Produk hukum daerah tentang pendidikan		1 dok	108,375			
			Peningkatan akurasi data potensi pendidikan	Data pokok pendidikan yang valid				1 dok	200,000	
			Penguatan pengarusutamaan Gender	Pokja PUG Pendidikan				1 pokja	75,000	
			Penguatan Kelembagaan Pendidikan	Penguatan kelembagaan				1 keg	75,000	
		1.01.01.06	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/ Tidak Mampu (SIMPOR)	Persentase masyarakat miskin/ tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	n/a	100%	58,500	100%	2,495,300	
			Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi siswa SD kurang Mampu (SIMPOR)	Siswa SD kurang mampu penerima bantuan		100%	36,000	100%	60,600	
			Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi siswa SMP kurang Mampu (SIMPOR)	Siswa SMP kurang mampu penerima bantuan		100%	22,500	100%	50,700	
			Beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat tidak mampu (SIMPOR)	Masyarakat berprestasi dan tidak mampu yang menerima beasiswa				30 org	2,384,000	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan perangkat daerah	75.12	87.07		87.17		
		3.01.05.29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	2,922,848	100%	1,558,931	

			Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat		100%	8,752	100%	8,752	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		100%	88,500	100%	88,500	
			Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor		100%	100,000	100%	100,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		100%	116,500	100%	143,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor		100%	10,000	100%	10,000	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		100%	13,730	100%	25,179	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan		100%	6,500			
			Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman		100%	60,520	100%	75,000	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		100%	465,000	100%	465,000	
			Penyediaan spanduk/umbul-umbul dan bendera	Spanduk/umbul-umbul dan bendera		100%	26,500			
			Kesejahteraan Non PNS	Kesejahteraan pegawai non PNS		100%	564,600	100%	678,000	
			Pengelolaan UPT Museum	Pengelolaan UPT Museum		100%	1,312,856			
			Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Tg.Pandan	Pengelolaan Satuan Pendidikan Kec. Tanjungpandan		100%	39,860			
			Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Sijuk	Pengelolaan Satuan Pendidikan Kec. Sijuk		100%	35,540			
			Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Membalong	Pengelolaan Satuan Pendidikan Kec. Membalong		100%	36,260			
			Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Badau	Pengelolaan Satuan Pendidikan Kec. Badau		100%	37,730			
			Penyediaan bahan bacaan	Bahan bacaan				100%	10,000	
		3.01.05.30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	560,610	100%	967,150	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor		2 jenis	63,300	3 jenis	75,000	
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik		100%	165,000	100%	115,000	
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		100%	188,914.50	100%	200,000	
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik		100%	15,000	100%	15,000	

			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		100%	21,150	100%	26,000	
			Pengadaan mebeleur	Mebeleur		5 set	82,000		0	
			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional Kantor				2 unit	480,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor				2 jenis	35,000	
			Pemeliharaan mebeleur	Mebeleur dalam kondisi baik				100%	21,150	
		3.01.05.31	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%		100%	649,400	
			Pengadaan mesin absensi	Mesin absensi				1 unit	5,000	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya				1074 stel	644,400	
			Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Pakaian hari-hari tertentu					0	
		3.01.05.31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40,000			
			Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur	Aparatur		5 org	40,000			
		3.01.03.05	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	175,000	
			Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perangkat daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah				10 org	75,000	
			Penilaian kinerja Pejabat Fungsional Pendidikan	Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan				2000 OK	100,000	
		3.01.05.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	100%	10,000			
			Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		1 dok	10,000			
			Peningkatan promosi potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	30,500			
			Promosi potensi daerah	Promosi potensi daerah		1 kali	30,500			
		3.01.05.32	Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	107,500	

			Penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				2 dok	8,500	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dok	8,500	
			Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen pelaporan perangkat daerah				2 dok	10,000	
			Pengelolaan website perangkat daerah	Informasi website update				1 web	50,000	
			Promosi pembangunan daerah	Promosi pembangunan daerah				1 kali	30,500	
Memaksimalkan ekosistem Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah				Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	10%	12%		14%		
	Meningkatnya ekosistem Pemajuan Kebudayaan			Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	10%	12%		14%		
		1.02.15.01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang berkembang	80%	82%	1,139,360	84%	13,793,171	
			Penyusunan Toponimi	Kajian Toponimi Kecamatan Tanjungpandan		1 dok	212,475	1 dok	250,000	
			Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Tersedianya VCD Pemenang Cipta Lagu Daerah		1 keg	61,385	1 keg	401,000	
			<i>Bantuan kepada Tokoh masyarakat (DABA)</i>	Insentif tokoh masyarakat		100%	495,500			
			Persemaian Nilai Budaya	Lomba mewarnai pelajar		14 kali	60,000	14 kali	60,000	
			Pelestarian Cagar Budaya	Cagar budaya yang dilestarikan		1 dok	110,000	1 bang	10,000,000	
			Peningkatan peran Tokoh Masyarakat (KEMINANGAN)	Insentif tokoh masyarakat		100%	200,000	100%	250,000	
			Pengelolaan UPT Museum	Operasional UPT Museum				1 thn	1,312,856	
			Pengelolaan Museum Maritim	Operasional museum maritim				1 thn	451,000	
			Pemberdayaan Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat yang diberdayakan				100%	495,500	
			Pembinaan Pelaku Seni Budaya	Pelaku Seni budaya yang dibina					0	
			<i>Bantuan Operasional Pengelolaan Museum</i>	Operasional museum				1 UPT	450,000	
			Penguatan Kelembagaan Kebudayaan	Lembaga Kebudayaan yang terbina					0	
		1.02.15.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	80%	100%	1,237,085			
			Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Pertunjukan Seni Budaya Belitung		34 kali	106,625			
			Sertifikasi ahli cagar budaya	Peserta Sertifikasi Cagar Budaya		7 org	165,850			
			Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Frekuensi Penyampaian nilai-nilai budaya kepada masyarakat		14 kali	44,060			

			Revitalisasi bangunan gedung dinas pendidikan dan kebudayaan tahap I	Bangunan cagar budaya yang direvitalisasi		1 bangunan	1,961,925			
			Pengelolaan Museum Maritim	Operasional Museum Maritim		1 upt	429,050			
			<i>BOP Museum (DAK Non Fisik)</i>	Bantuan Operasional pengelolaan Museum		100%	450,000			
		1.02.15.03	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	80%	90%	223,515			
			Penyelenggaraan festival budaya daerah	Festival seni budaya daerah yang diselenggarakan		1 kali	172,665			
			Penyelenggaraan audisi gita bahana nusantara	Terpilihnya Peserta Gita Bahana Nusantara		1 kali	50,850			

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2023 terdiri dari sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Pengembangan Kurikulum
 - a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pembinaan Sejarah
 - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Permuseuman
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Adapun rincian pendanaan dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan periode Renstra 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Lanjutan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan		Sasaran		Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Tahun Perencanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s.d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	lokasi		
										2021		2022		2023							
										Target	Rp (x1000)	Target	Rp (x1000)	Target	Rp (x1000)	Target	Rp (x1000)				
(1)		(2)		(3)			(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/ KOTA				170,717,431.3		182,034,337.42		188,657,086.2		541,408,854.92	Sekretariat		
										1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%		100%		100%		100%			
				1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	35,452	5 Dokumen	12,500	5 Dokumen	12,938	16 Dokumen	60,890.40		
				1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	-	3 Dokumen	5,000	3 Dokumen	5,175	9 Dokumen	10,175.00		
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,000	3 Dokumen	5,175				
				1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	35,452	3 Dokumen	7,500	3 Dokumen	7,763	9 Dokumen	50,714.90		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7,500	3 Laporan	7,763				
				1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah		3 Dokumen	168,234,070	3 Dokumen	179,562,795	3 Dokumen	185,983,134	9 Dokumen	533,779,999.52		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	132,517,823	14 Bulan	140,940,189	14 Bulan	145,873,096	14 Bulan	132,517,823.00		
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.451 Orang/ bulan	179,555,295	1.551 Orang/ bulan	185,975,371	3.002 Orang/ bulan	365,530,666.64		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT SMPN 1 Tg.Pandan)	Gaji dan Tunjangan ASN UPT SMPN 1 Tg.Pandan		14 Bulan	2,355,493					14 Bulan	2,355,492.99		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT SMPN 2 Tg.Pandan)	Gaji dan Tunjangan ASN UPT SMPN 2 Tg.Pandan		14 Bulan	3,076,824					14 Bulan	3,076,824.08		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT SMPN 3 Tg.Pandan)	Gaji dan Tunjangan ASN UPT SMPN 3 Tg.Pandan		14 Bulan	2,501,226					14 Bulan	2,501,226.00		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT SMPN 4 Tg.Pandan)	Gaji dan Tunjangan ASN UPT SMPN 4 Tg.Pandan		14 Bulan	2,152,072					14 Bulan	2,152,072.20		
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT SMPN 5 Tg.Pandan)	Gaji dan Tunjangan ASN UPT SMPN 5 Tg.Pandan		14 Bulan	2,266,555					14 Bulan	2,266,555.00		

[illegible]

1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang perangkat daerah		3 Dokumen	225,000	5 Dokumen	205,000	6 Dokumen	212,175	14 Dokumen	642,175.00		
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Penyusunan DED		3 dokumen	225,000	0	0			3 dokumen	225,000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
1	01	01	2.03	04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jasa Pengawasan Kegiatan				4 dokumen	200,000	5 dokumen	207,000	9 dokumen	407,000.00		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	200,000	5 Laporan	207,000	9 Laporan	407,000.00		
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	5,000	1 Laporan	5,175	2 Laporan	10,175.00		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000	1 Laporan	5,175	2 Laporan	10,175.00		
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				75%		78%		78%	-		
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		1140 org	136,598	1140 org	140,500	1140 org	145,418	1140 org	422,516.00		
1	01	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Finger Print		10 Unit	26,098	Unit		Unit		10 Unit	26,098.00		
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PDH				0	-				-		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Penilaian pejabat Fungsional		1500 Dokumen	60,500	1500 Dokumen	60,500	1500 Dokumen	62,618	1500 Dokumen	60,500.00		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1500 Dokumen	60,500	1500 Dokumen	62,618	3000 Dokumen	123,118.00		
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang kali	50,000	5 Orang kali	80,000	10 Orang kali	82,800	5 Orang kali	50,000.00		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	80,000	10 Orang	82,800	15 Orang	162,800.00		
						3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%	-		
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah		100%	631,762.9	100%	697,752.0	100%	748,047.0	100%	2,077,561.90		

1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	14,000	100%	14,994	100%	15,519	100%	14,000.00		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	14,994	1 paket	15,519	2 paket	30,513.00		
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	140,456	100%	128,495	100%	132,992	100%	140,456.40		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	128,495	1 paket	132,992	2 paket	261,487.00		
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga		100%	25,000	100%	41,856.5	100%	43,321	100%	25,000.00		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	41,856.5	1 paket	43,321	2 paket	85,177.50		
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor		100%	200,950	100%	211,049.5	100%	218,436	100%	200,949.50		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	211,049.5	1 paket	218,436	2 paket	429,485.50		
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		100%	116,357	100%	116,357	100%	120,429	100%	116,357.00		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	116,357	1 paket	120,429	2 paket	236,786.00		
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	10,000	100%	10,000	100%	10,350	100%	10,000.00		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000	12 Dokumen	10,350	24 Dokumen	20,350.00		
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	125,000	100%	200,000	100%	207,000	100%	125,000.00		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	175,000	12 laporan	207,000	24 laporan	382,000.00		
						4. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100%		100%		100%			
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah		5 Jenis	284,008.1	5 Jenis	48,979.0	5 Jenis	50,693.0	5 Jenis	383,680.10		
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pick-Up				0	-				-		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Unit		Unit			-		
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi Rapat				0	-				-		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Unit		Unit			-		
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC, PC, Printer		3 Jenis	84,008.1	3 Jenis	48,979.0	3 Jenis	50,693	3 Jenis	84,008.10		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	48,979	3 Unit	50,693	6 unit	99,672.00		

1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gudang, Toilet Umum, Selasar				0	-				-		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit		Unit			-		
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Conblock, Gapura, Front Desk		1 paket	200,000	0	-			1 paket	200,000.00		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit		Unit			-		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		100%	856,250	100%	877,750	100%	881,906	100%	2,615,906.00		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Materai		475 Lembar	8,750	475 Lembar	8,750	475 Lembar	9,056	1425 Lembar	8,750.00		
						2. Jumlah barang/surat yang dikirim		100 Kali		100 Kali		100 Kali		300 Kali			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	8,750	12 laporan	9,056	24 laporan	17,806.00		
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		12 bulan	88,500	12 bulan	110,000	12 bulan	113,850	12 bulan	88,500.00		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	110,000	12 laporan	113,850	24 laporan	223,850.00		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tenaga Non PNS Supir		1 Orang	759,000	1 Orang	759,000	1 Orang	759,000	1 Orang	759,000.00		
						2. Tenaga Non PNS Penjaga Malam		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang			
						3. Tenaga Non PNS Petugas Kebersihan		14 Orang		14 Orang		14 Orang		14 Orang			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	759,000	12 laporan	759,000	24 laporan	1,518,000		
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		5 Jenis	314,290	5 Jenis	489,061	5 Jenis	622,775	5 Jenis	1,426,126.00		
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4/ lebih yang dipelihara		1 Tahun	127,850	2 Unit	165,000	2 Unit	170,775	1 Tahun	127,850.00		
						2. Kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan Roda 2/3 yang dipelihara				43 Unit		43 Unit					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	165,000	45 Unit	170,775	45 unit	335,775.00		

				1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Kendaraan dinas Operasional/lapangan Roda 4/ lebih yang dipelihara				3 Unit	127,850	3 Unit	130,000		-		
									2. Kendaraan dinas Operasional/ Lapangan Roda 2/3 yang dipelihara				7 Unit		7 Unit						
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	127,850	10 Unit	130,000	10 unit	257,850.00		
				1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Proyektor		1 tahun	71,465	4 Unit	71,465	4 Unit	72,000	1 tahun	71,465.00		
										AC				22 Unit		22 Unit					
										Mesin rumput				1 Unit		1 Unit					
										Sound System				1 Set		1 Set					
										Mesin Air				4 Unit		4 Unit					
										PC/Laptop				35 Unit		35 Unit					
										Printer				32 Unit		32 Unit					
											Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					99 Unit		71,465	99 Unit	72,000	99 unit
				1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Bangunan Kantor		1 Gedung	114,975	2182 M2	124,746	2182 M2	150,000	1 Gedung	114,975.00		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	124,746	2 Unit	150,000	4 unit	274,746.00		
				1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Halaman				-		3000 M2	100,000		-		
										Rehab Pagar				0		180 M2					
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						1 Unit	100,000	1 unit	100,000.00		
				1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat									Rata-rata lama sekolah (RLs)	8,15 Thn	8,46 Thn		8,51 Thn		8,56 Thn	
1.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan									Persentase Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	0.31	0.24		0.20		0.18		0.18			
1.1.2		Meningkatnya Mutu Layanan Manajemen Kependidikan									Indeks Pemerataan Guru PNS										
	- Guru Kelas			0.10			0.10		0.80		0.80										
	- Guru Mata Pelajaran Tingkat SD			0.18			0.18		0.17		0.17										
	- Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP			0.34		0.34		0.32		0.32											

						1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				76,009,606			55,062,172			95,032,723			226,104,501.49		
										Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			100%		100%		100%		100%							
										Angka Partisipasi Murni (APM) SD			97.84%		98.24%		98.64%		98.64%							
						1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100%	31,548,612	100%	27,538,667	100%	38,062,078	100%	97,149,357.17	Bidang SD				
						1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas		1 ruang	150,000	1 ruang	129,128	6 ruang	133,647	1 ruang	150,000.00					
												Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						6 ruang	133,647	7 ruang	133,647.00					
						1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang guru/Kepala Sekolah/TU		1 ruang	219,699	10 ruang	2,228,940	5 ruang	2,306,953	1 ruang	219,699.00					
												Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 ruang	668,682	5 ruang	2,306,953	15 ruang	2,975,635.00					
						1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3 unit	266,874	7 ruang	571,095	3 ruang	591,083	3 ruang	266,874.00					
												Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 ruang	163,170	3 ruang	591,083	10 ruang	754,253.00					
						1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah Dasar		1 ruang	209,714					1 ruang	209,714.00					
												Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				ruang		ruang		ruang	-					
						1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	Pagar Sekolah		13 unit	632,686		1,760,460 5,589,456	Meter	5,050,000	13 unit	632,686.00					
										Toilet				13 Unit	20 Unit			-								
										Laboratorium Komputer				24 Unit	Unit			-								
												Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 unit	1,353,430	2 unit	5,050,000	4 unit	6,403,430.00					
						1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas	Ruang Kelas dalam kondisi baik		10 ruang	4,234,570	15 ruang	2,096,040	45 ruang	2,169,401	10 ruang	4,234,570.00					
												Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/ Berat					-	45 ruang	2,169,401	60 ruang	2,169,401.00					
						1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah dalam kondisi baik						5 ruang	425,000		-					
												Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						5 ruang	425,000	5 ruang	425,000.00					
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah dalam kondisi baik						5 ruang	250,000		-											
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						5 ruang	250,000	5 ruang	250,000.00											

1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah dalam kondisi baik		9 ruang	1,006,624	4 ruang	510,600	5 ruang	528,471	9 ruang	1,006,624.00		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						5 ruang	528,471	9 ruang	528,471.00		
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik		1 Sekolah	119,964	5 Sekolah	284,396	5 Sekolah	294,350	1 Sekolah	119,964.00		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi						5 unit	294,350	10 unit	294,350.00		
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Guru dalam Kondisi baik				0	-	10 unit	1,268,000		-		
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat						10 unit	1,268,000	10 unit	1,268,000.00		
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah				0	-						
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia						paket		paket			
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Administrasi siswa Sekolah Dasar			387,040						387,040.00		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia						paket		paket	-		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar	Biaya personil peserta didik sekolah dasar		500 siswa	347,078	500 siswa	200,000	685 siswa	207,000	500 siswa	347,078.00		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				421 peserta didik	213,314	685 peserta didik	207,000	1185 peserta didik	420,314.10		
1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peralatan Teknologi Informatika Komputer (TIK)		42 Paket	1,433,784	22 Paket	2,750,000	20 Paket	2,846,250	42 Paket	1,433,784.00		
						Media Pendidikan				24 Paket	1,080,000				-		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 paket	2,340,000	20 paket	2,846,250	66 paket	5,186,250.00		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Buku Administrasi Pendidikan SD				6 Jenis	623,162.5	6 Jenis	644,973		-		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				120 satuan pendidikan	2,899,585.1	120 satuan pendidikan	644,973	120 satuan pendidikan	3,544,558.13		
1	01	02	2.01	25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Lomba- lomba siswa SD		4 jenis lomba	307,565	4 jenis lomba	110,000	4 jenis lomba	113,850	4 jenis lomba	307,565.14		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				600 peserta didik	96,686	600 peserta didik	113,850	1200 peserta didik	210,535.80		

1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru Tidak Tetap Jenjang SD yang Menerima Insentif		150 orang	1,296,250	150 orang	1,056,000	150 orang	1,296,300	150 orang	1,296,250.00		
						Pegawai Tidak Tetap Jenjang SD yang Menerima Insentif		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				270 orang	1,250,000	270 orang	1,296,300	270 orang	2,546,300		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah		25 Orang	1,365,514			60 Orang	2,593,000	25 Orang	1,365,514.00		
						Peserta Pendidikan Profesi Guru		25 Orang		25 Orang	150,000	75 Orang		25 Orang			
						Guru Menulis		30 Orang				80 Orang		30 Orang			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 orang	200,000	215 orang	2,593,000	240 orang	2,793,000		
1	01	02	2.01	28	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan MBS		122 Sekolah	19,571,250	0	-			122 Sekolah	19,571,250.00		
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah									-		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Pemanfaatan Dana BOS Sekolah Dasar				120 sekolah	17,218,800	120 sekolah	17,821,458		-		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				120 satuan pendidikan	18,353,800	120 satuan pendidikan	17,218,800	120 satuan pendidikan	35,572,600.00		
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peserta bimtek pengelolaan dana BOS pendidikan dasar				0	-	154 orang	125,000	154 orang	-		
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						154 orang	125,000	154 orang	125,000.00		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		100%		100%		100%		100%			
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		82.89%		83.29%		83.69%		83.69%			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah pertama		100%	33,244,435	100%	18,760,423	100%	42,970,559	100%	94,975,416.55	Bidang SMP	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit Sekolah Baru		1 USB	1,297,200	Unit	-	Unit		1 USB	1,297,200.00		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						unit		unit	-		

1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru				1 ruang	149,563	4 ruang	849,563		-		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 ruang	259,778	4 ruang	849,563	5 ruang	1,109,341.00		
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				6 ruang	3,584,052	2 ruang	984,052		-		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 ruang	1,194,684	2 ruang	984,052	8 ruang	2,178,736.00		
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah				8 ruang	2,224,792	2 ruang	224,792		-		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 ruang	556,198	2 ruang	224,792	10 ruang	780,990.00		
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah				1 ruang	579,538	1 ruang	599,822		-		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun						1 ruang	599,822	2 ruang	599,822.00		
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium Komputer				6 ruang	3,911,754	6 Unit	4,048,665		-		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 ruang	1,303,918	6 Unit	4,048,665	12 unit	5,352,583.00		
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Guru				0	-	3 unit	582,500		-		
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					-	3 Unit	582,500	3 unit	582,500.00		
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah				0	-	5 unit	482,500		-		
						Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun					-	5 Unit	482,500	5 unit	482,500.00		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	Pagar Sekolah WC Sekolah Ruang Keterampilan				Unit	-	Unit	1,545,000		-		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					-	5 Unit	1,545,000	5 Unit	1,545,000.00		
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah dalam Kondisi baik		31 ruang	10,122,500	48 ruang	10,014,384	48 ruang	10,564,887	31 ruang	10,122,500.00		
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						48 ruang	10,564,887	96 ruang	10,564,887.00		
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/berat ruang guru/Kepala sekolah/TU Sekolah	Ruang guru/Kepala sekolah/TU Sekolah dalam kondisi baik		3 ruang	1,728,721	9 ruang	2,256,680	8 ruang	2,842,864	3 ruang	1,728,721.00		
						Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						8 ruang	2,842,864	17 ruang	2,842,864.00		
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah dalam kondisi baik				2 ruang	99,348	1 ruang	102,825		-		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						1 ruang	102,825	3 ruang	102,825.00		

1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah dalam kondisi baik		5 ruang	1,835,530	4 ruang	1,043,136	1 ruang	1,079,646	5 ruang	1,835,530.00		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						4 ruang	1,079,646	8 ruang	1,079,646.00		
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium	Laboratorium IPA dalam kondisi baik		3 ruang	1,537,500	3 ruang	1,955,880	5 ruang	1,190,000	3 ruang	1,537,500.00		
						Laboratorium Komputer		2 ruang						2 ruang			
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						3 ruang	1,190,000	6 ruang	1,190,000.00		
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Guru dalam kondisi baik				0	-	1 unit	202,000		-		
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						1 unit	202,000	1 unit	202,000.00		
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Mushola dalam Kondisi baik		1 unit	1,208,024	8 Unit	2,055,249	8 Unit	1,000,000	1 Unit	1,208,024.00		
						Toilet/ Jamban dalam Kondisi baik		5 unit						5 unit			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						8 unit	1,000,000	16 unit	1,000,000.00		
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah				Paket		10 Paket	300,000		-		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						10 paket	300,000	10 paket	300,000.00		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama		315 siswa	160,768	215 siswa	107,500	315 siswa	111,263	315 siswa	160,767.60		
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				215 siswa	107,440	315 siswa	111,263	530 siswa	218,703.00		
1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peralatan Laboratorium IPA Fisika		2 paket	90,000	42 Paket	557,340	40 Paket	921,516	2 Paket	90,000.00		
						Peralatan Laboratorium IPA Biologi											
						Media Pendidikan											
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				14 paket	359,170	40 paket	921,516	82 paket	1,280,686.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Buku Administrasi Pendidikan SMP		5 jenis	257,324	Peserta Didik	259,370	Peserta Didik	301,362	5 jenis	257,323.70		
						Workshop Penilaian SMP											
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				150 Peserta Didik	1,219,371	150 Peserta Didik	301,362	300 Peserta Didik	1,520,733		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 1 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 1 Tg.Pandan		12 bulan	307,084	Peserta Didik	261,375	Peserta Didik	270,523	12 bulan	307,083.50		

						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				468 Peserta Didik	261,375	468 Peserta Didik	270,523	936 Peserta Didik	531,897.80		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 2 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 2 Tg.Pandan		12 bulan	344,028	Peserta Didik	292,825	Peserta Didik	303,074	12 bulan	344,027.80		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				647 Peserta Didik	292,813	600 Peserta Didik	303,074	1247 Peserta Didik	595,887.20		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 3 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 3 Tg.Pandan		12 bulan	248,247	Peserta Didik	216,630	Peserta Didik	224,212	12 bulan	248,246.90		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				634 Peserta Didik	216,630	607 Peserta Didik	224,212	1241 Peserta Didik	440,842.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 4 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 4 Tg.Pandan		12 bulan	172,587	Peserta Didik	147,050	Peserta Didik	152,197	12 bulan	172,586.60		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				610 Peserta Didik	162,550	570 Peserta Didik	152,197	1180 Peserta Didik	314,747.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 5 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 5 Tg.Pandan		12 bulan	208,273	Peserta Didik	177,225	Peserta Didik	183,428	12 bulan	208,273.10		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				533 Peserta Didik	182,022	493 Peserta Didik	183,428	1026 Peserta Didik	365,450.40		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 6 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 6 Tg.Pandan		12 bulan	225,444	Peserta Didik		Peserta Didik	198,824	12 bulan	225,444.45		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				497 Peserta Didik	192,099	514 Peserta Didik	198,824	1011 Peserta Didik	390,923.49		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 7 Tg.Pandan)	Laporan Operasional UPT SMPN 7 Tg.Pandan		12 bulan	383,058	Peserta Didik	325,975	Peserta Didik	337,384	12 bulan	383,057.70		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				525 Peserta Didik	325,975	495 Peserta Didik	337,384	1020 Peserta Didik	663,358.80		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 1 Sijuk)	Laporan Operasional UPT SMPN 1 Sijuk		12 bulan	202,624	Peserta Didik	172,550.0	Peserta Didik	178,589	12 bulan	202,623.70		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				392 Peserta Didik	172,550.0	382 Peserta Didik	178,589	774 Peserta Didik	351,139.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 2 Sijuk)	Laporan Operasional UPT SMPN 2 Sijuk		12 bulan	311,976	Peserta Didik	265,200	Peserta Didik	274,482	12 bulan	311,975.70		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				532 Peserta Didik	264,264	460 Peserta Didik	274,482	992 Peserta Didik	538,746.00		

1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 3 Sijuk)	Laporan Operasional UPT SMPN 3 Sijuk		12 bulan	163,729	Peserta Didik	139,400	Peserta Didik	144,279	12 bulan	163,729.10		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				265 Peserta Didik	139,930	274 Peserta Didik	144,279	539 Peserta Didik	284,209.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 4 Sijuk)	Laporan Operasional UPT SMPN 4 Sijuk		12 bulan	126,098	Peserta Didik	107,525	Peserta Didik	111,288	12 bulan	126,097.70		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				103 Peserta Didik	107,525	120 Peserta Didik	111,288	223 Peserta Didik	218,813.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 1 Badau)	Laporan Operasional UPT SMPN 1 Badau		12 bulan	210,956	Peserta Didik	179,313	Peserta Didik	185,588	12 bulan	210,956.00		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				248 Peserta Didik	179,312	260 Peserta Didik	185,588	508 Peserta Didik	364,900.30		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 2 Badau)	Laporan Operasional UPT SMPN 2 Badau		12 bulan	273,417	Peserta Didik	232,900	Peserta Didik	241,052	12 bulan	273,416.62		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				265 Peserta Didik	232,890	256 Peserta Didik	241,052	521 Peserta Didik	473,942.25		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 3 Badau)	Laporan Operasional UPT SMPN 3 Badau		12 bulan	134,799	Peserta Didik	114,750	Peserta Didik	118,766	12 bulan	134,799.00		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				179 Peserta Didik	114,768	180 Peserta Didik	118,766	359 Peserta Didik	233,533.50		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 1 Membalong)	Laporan Operasional UPT SMPN 1 Membalong		12 bulan	184,968	Peserta Didik	157,675	Peserta Didik	163,194	12 bulan	184,967.90		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				294 Peserta Didik	157,675	225 Peserta Didik	163,194	519 Peserta Didik	320,869.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 2 Membalong)	Laporan Operasional UPT SMPN 2 Membalong		12 bulan	229,865	Peserta Didik	195,500	Peserta Didik	202,343	12 bulan	229,864.60		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				342 Peserta Didik	195,500	332 Peserta Didik	202,343	674 Peserta Didik	397,843.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 3 Membalong)	Laporan Operasional UPT SMPN 3 Membalong		12 bulan	144,173	Peserta Didik	122,307	Peserta Didik	126,587	12 bulan	144,173.30		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				93 Peserta Didik	122,306	90 Peserta Didik	126,587	183 Peserta Didik	248,893.00		

1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 4 Membalong)	Laporan Operasional UPT SMPN 4 Membalong	12 bulan	62,658	Peserta Didik	56,700	Peserta Didik	58,685	12 bulan	62,658.00		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			52 Peserta Didik	56,700	60 Peserta Didik	58,685	132 Peserta Didik	115,385.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 5 Membalong)	Laporan Operasional UPT SMPN 5 Membalong	12 bulan	152,638	Peserta Didik	130,050	Peserta Didik	134,602	12 bulan	152,637.75		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			196 Peserta Didik	130,000	200 Peserta Didik	134,602	396 Peserta Didik	264,602.00		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 1 Selat Nasik)	Laporan Operasional UPT SMPN 1 Selat Nasik	12 bulan	165,476	Peserta Didik	141,100	Peserta Didik	146,039	12 bulan	165,475.55		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			188 Peserta Didik	141,100	196 Peserta Didik	146,039	384 Peserta Didik	287,138.70		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik (UPT SMPN 2 Selat Nasik)	Laporan Operasional UPT SMPN 2 Selat Nasik	12 bulan	102,236	Peserta Didik	87,550	Peserta Didik	90,614	12 bulan	102,236.00		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			56 Peserta Didik	87,514	55 Peserta Didik	90,614	111 Peserta Didik	178,128.00		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba- lomba siswa SMP	9 Jenis Lomba	236,311	Peserta Didik	306,186.0	Peserta Didik	316,903	9 jenis lomba	236,311.20		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik			400 Peserta Didik	306,185.6	400 Peserta Didik	306,903	800 Peserta Didik	613,088.60		
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Tidak Tetap yang menerima insentif	50 Orang	720,000	150 Orang	576,000	150 Orang	720,597	50 Orang	720,000.00		
						Pegawai Tidak Tetap yang menerima insentif	100 Orang						100 Orang			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			150 orang	730,400	150 orang	720,597	150 orang	1,450,997.00		
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimtek tenaga administrasi sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama			0		21 Orang	146,320		-		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					21 orang	146,320	21 orang	146,320.00		

1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		32 Sekolah	9,696,226	Satuan Pendidikan	-	32 Satuan Pendidikan	1,101,000	32 sekolah	9,696,226.24		
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan						32 Satuan Pendidikan	1,101,000	32 Satuan Pendidikan	1,101,000.00		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				29 Satuan Pendidikan	8,615,200	29 Satuan Pendidikan	8,916,732		-		
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				29 Satuan Pendidikan	8,987,780	29 Satuan Pendidikan	8,916,732	29 Satuan Pendidikan	17,904,512.00		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		65.93%		67.43%		68.93%		68.93%			
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100%	7,278,364	100%	6,927,127	100%	9,923,312	100%	24,128,802.30	Bidang PAUD dan PNF	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang Guru		1 ruang	575,608	4 ruang	396,804	1 Unit	410,692	1 ruang	575,608.40		
						Ruang Kepala Sekolah											
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 ruang	195,308	1 unit	410,692	5 unit	606,000.00		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD	APE Luar Ruang				8 Unit	1,274,000	3 Unit	2,030,000		-		
						Ruang UKS					793,608						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 unit	1,042,005	3 unit	2,030,000	11 unit	3,072,005		
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi sedang/berat Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang Guru kelas dalam kondisi baik				4 Unit	476,164	2 Unit	492,830		-		
						Ruang Guru dan Kepala sekolah dalam kondisi baik					59,521				-		
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						2 unit	492,380	6 unit	492,380.00		
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, prasarana dan utilitas PAUD dalam kondisi baik		1 unit	330,000	Unit		Unit		1 unit	330,000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Meja kursi Siswa				Paket		4 Paket	120,000		-		
						Lemari Guru											
						Loker Siswa											
						Lemari APE											
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia						4 paket	120,000	4 paket	120,000.00		

1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD				paket		2 paket	72,000		-		
						Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia						2 paket	72,000	2 paket	72,000.00		
1	01	02	2.03	11	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Toilet (Jamban) dalam kondisi baik				Unit	71,947	Unit	74,465		-		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						1 unit	74,465	2 unit	74,465.00		
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				28 Paket	700,000	1 Jenis	724,500		-		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				12 Paket	300,000	1 jenis	724,500	2 jenis	1,024,500.00		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Laporan Operasional TK Negeri		15 Lembaga	3,014,730		499,350		938,207	15 lembaga	3,014,729.66		
						Buku Administrasi PAUD				Peserta Didik	50,111	Peserta Didik					
						Lomba PAUD					257,000						
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				652 Peserta Didik	801,234	Peserta Didik	938,207	Peserta didik	1,739,441		
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peserta Bimtek Kurikulum TK		104 orang	123,445		-		104 orang		123,444.50		
						Peserta Bimtek Kurikulum PAUD Non Formal				Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	359,130				
						Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi						15 Satuan Pendidikan	359,130	15 satuan pendidikan	359,130.00		
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	GTT yang menerima insentif		350 orang	2,744,195	380 orang	2,592,000	380 orang	2,736,995	350 orang	2,744,195.00		
						PTT yang menerima insentif		30 orang						30 orang			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				350 orang	2,599,200	380 orang	2,736,995	380 orang	5,336,195.00		
1	01	02	2.03	16	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi kompetensi		106 Orang	286,084	Orang		70 Orang	150,000	106 orang	286,084.05		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						70 orang	150,000	70 orang	150,000.00		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Laporan Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		15 Lembaga	204,302	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	225,243	15 lembaga	204,302.04		
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						15 Satuan Pendidikan	225,243	15 satuan pendidikan	225,243.00		

[illegible]

1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyusunan Naskah Soal			153,848	Peserta Didik	100,085	Peserta Didik	103,588	418 siswa	153,847.68		
						Ujian Kesetaraan Paket A/B/C		418 siswa									
						Peserta Bimtek Kurikulum Kesetaraan											
						Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				7 satuan Pendidikan	318,896	7 satuan Pendidikan	103,588	7 satuan Pendidikan	422,484		
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) satuan pendidikan nonformal yang menerima insentif		50 Orang	2,130,566	50 Orang	2,232,000	50 Orang	2,310,120	50 Orang	2,130,565.80		
						Ustad/Ustadzah yang menerima Insentif		716 Orang						716 Orang			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				766 orang	303,000	766 orang	2,310,120	766 orang	2,613,120.00		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Nonformal/ Kesetaraan	Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				7 Satuan Pendidikan	717,800	7 Satuan Pendidikan	717,800		-		
						Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 satuan pendidikan	336,710	7 satuan pendidikan	717,800	7 satuan pendidikan	1,054,510.00		
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menggunakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah			-		-	75%	105,000	75%	105,000.00		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					-	1 Dokumen	105,000	1 Dokumen	105,000.00		
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Orang	-	Orang	105,000				
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya						Orang	105,000	1 Dokumen	105,000.00		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV			-		-	89.03	402,465	89.03	402,465.00	Bidang Ketenag aan	
						Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik						85.03		85.03			
1	01	04	2.01		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rekomendasi Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1 Dokumen	-		-	1 Dokumen	402,465	1 Dokumen	402,465.00		

2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Pelaku budaya yang mendapatkan penghargaan				3 Sertifikat	27,904	13 Sertifikat	28,881		-		
						Festival Seni Budaya											
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 sertifikat	27,899	13 sertifikat	28,881	16 sertifikat	56,780		
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga adat yang terbina		1 lembaga	659,914	1 lembaga	659,128	1 lembaga	758,652	1 lembaga	2,077,694.28		
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Lembaga Adat	Aktualisasi Nilai Budaya				objek	-	1 Objek	98,820		-		
						Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan						1 Objek	98,820	1 objek	98,820.00		
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Tokoh Masyarakat yang mendapatkan insentif		120 orang	659,914	120 orang	659,832	120 orang	659,832	120 orang	659,914.05		
						Sosialisasi Adat Belitong											
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				120 orang	659,128	120 orang	659,832	120 orang	1,318,960		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya kualitas pengelolaan kesenian tradisional			-		-	50%	195,000	50%	195,000.00	Bidang	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	SDM pengelola sanggar seni tradisional yang terbina			-		-	100 Orang	195,000	100 Orang	195,000.00	Kebuday	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya manusia Kesenian Tradisional	Peserta Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional				Orang	-	100 orang	105,000		-		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)						100 orang	105,000	100 orang			
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan sertifikasi Sumber daya manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Pelaku Seni Tradisional yang terdata				Sertifikat	-	Sertifikat	40,000		-		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi						4 sertifikat	40,000	4 sertifikat	40,000.00		

[illegible]

						2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		55	3,715,908	60	2,661,776.3	70	2,838,727	70	9,216,411.61	UPT Museum	
						2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Museum		1100 orang	3,715,908	1200 orang	2,661,776.3	1300 orang	2,838,727.0	3600 orang	9,216,411.61		
						2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Museum yang dikelola		2 Museum	545,586	Unit	641,722.0	Unit	664,182	2 Museum	545,585.60		
												Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				unit	442,878.6	Unit	664,182		1,107,060.55		
						2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber daya manusia Permuseuman	Jumlah SDM museum yang mengikuti pelatihan				6 Orang	140,000	6 Orang	144,900		-		
												Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				6 Orang	128,856	6 Orang	144,900	12 Orang	273,756.00		
						2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Laporan Operasional Pengelolaan Museum		3 Dokumen	2,061,996	Unit	1,861,010	Unit	1,926,145	3 Dokumen	2,061,995.82		
												Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				2 Unit	1,935,042	2 Unit	1,926,145	2 Unit	3,861,186.74		
						2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Gedung museum dalam kondisi baik		100%	908,327	Unit	100,000	Unit	103,500	100%	908,326.89		
												Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	155,000	2 Unit	103,500	2 Unit	258,500.00		
						2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Gedung museum dalam kondisi baik		100%	200,000	Unit		Unit		100%	200,000		
												Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi									-		
						J U M L A H									251,639,690		241,032,693		289,193,679		781,866,061.77		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, memiliki Kewenangan dalam bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Menilai Kinerja Masing-masing urusan, dirumuskan Indikator Kinerja masing-masing urusan yang harus dicapai melalui Program dan Kegiatan Skala lima tahun ataupun tahunan yang tergambar dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang pada RPJMD melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator Kinerja yang ditetapkan mengacu pada Indikator Kinerja utama Pemerintah Daerah, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator Kinerja masing-masing Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun-1/ 2019	Tahun-2/ 2020	Tahun-3/ 2021	Tahun-4/ 2022	Tahun-5/ 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Misi Kesatu RPJMD : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan								
	1.	Urusan Pendidikan							
	1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun).	8,15	8,41	8,45	8,46	8,51	8,56	8,56

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, serta akibat perubahan arah kebijakan pembangunan daerah terkait munculnya pandemic Covid 19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Perubahan Rencana Strategi perangkat daerah ini sebagai upaya untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Prioritas pembangunan daerah dalam upaya penanganan dampak Covid 19 di bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Belitung.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman strategis dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Belitung sampai dengan akhir masa jabatan di Tahun 2023. Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat berkaitan dengan arah dan kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilakukan di Kabupaten Belitung hingga akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH,S.Sos